



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0512/0/1991 TANGGAL : 5 SEPTEMBER 1991



TENTANG
PENGALIHAN PROGRAM PENDIDIKAN GURU
SEKOLAH DASAR MENJADI
SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS NEGERI



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1991

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 0519/O/1991

TENTANG

PENGALIHAN PROGRAM PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
MENJADI SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas dayaampung Sekolah Menengah Atas Negeri, dipandang perlu mengalihkan Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada IKIP dan FKIP Universitas Negeri menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia, Lembaran Negara Nomor 448 Tahun 1925 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 dan 30 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 226/M Tahun 1986;
e. Nomor 64/M Tahun 1988.

U. Nomor 0182/O/1983 dan Nomor 0170/O/1983
tanggal 14 Maret 1983.

c. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;

d. Nomor 0116/O/1991 tanggal 15 Maret 1991.

Perhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dalam suratnya tanggal 20 Agustus 1991
Nomor B-762/I/91.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Mengalihkan GI Program Pendidikan Guru Sekolah
Dasar (PGSD) pada IKIP dan FKIP Universitas Negeri
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0116/O/91 tanggal
15 Maret 1991 menjadi SMA Negeri di lingkungan
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan di Propinsi sebagaimana tersebut pada
Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi
dan tata kerja serta struktur organisasi SMA
Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama
diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember
1978.
- Tiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk
melaksanakan ketentuan pada diktum Pertama bagi
sekolah yang berada di wilayahnya.
- Empat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini
bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata
anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran
Keputusan ini dan mata anggaran yang relevan.

: Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah SMA Negeri menjadi 1.954 buah tersebar di 27 Propinsi.

Menam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 1991
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b

Sekretaris Jenderal

ttd

BAMBANG TRIANTORO

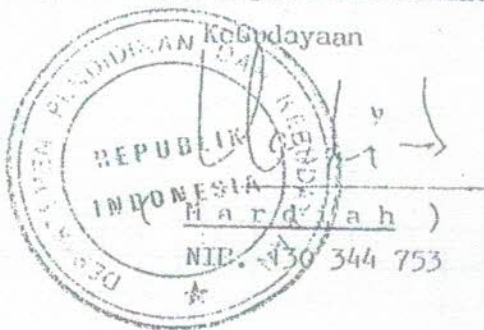
Salinan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Seluruh Indonesia
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi Seluruh Indonesia
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan



No.	Nama Sekolah yang diusulkan	Nama PGSD (Bekas SPGN/SGCN)	L O K A S I			Mata Anggaran
			Alamat Sekolah	Kecamatan	Kab/Kodya/kodyatip	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA					
	1. SMA Negeri 112 Jakarta	PGSD IKIP Jakarta (Bekas SPGN 5 Jakarta)	Jl. Meruya Ilir, Palmerah Jakarta Barat	Kembangan	Kodyatip Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.001.5110 09.1.2.1038.23.01.001.5120 09.1.2.1038.23.01.001.5130 09.1.2.1038.23.01.001.5210 09.1.2.1038.23.01.001.5220 09.1.2.1038.23.01.001.5230 09.1.2.1038.23.01.001.5250 09.1.2.1038.23.01.001.5350
2.	SMA Negeri 113 Jakarta	PGSD IKIP Jakarta (Bekas SPGN 7 Jakarta)	Jl. Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur	Pasar Rebo	Kodyatip Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.001.5250
	JAWA BARAT					
2.	SMA Negeri 7 Cirebon	PGSD IKIP Bandung (Bekas SPGN Cirebon)	Jl. Perjuangan, Cirebon	Nesambi	Kodya Cirebon	09.1.2.1038.23.01.002.5110 09.1.2.1038.23.01.002.5120 09.1.2.1038.23.01.002.5130 09.1.2.1038.23.01.002.5210 09.1.2.1038.23.01.002.5220 09.1.2.1038.23.01.002.5230 09.1.2.1038.23.01.002.5250 09.1.2.1038.23.01.002.5350
	SMA Negeri 7 Bogor	PGSD IKIP Bandung (Bekas SGON Bogor)	Jl. Palipuh, Perumnas Bantarjati	Kota Bogor Utara	Kodya Bogor	09.1.2.1038.23.01.002.5210 09.1.2.1038.23.01.002.5220 09.1.2.1038.23.01.002.5230 09.1.2.1038.23.01.002.5250 09.1.2.1038.23.01.002.5350
3.	JAWA TENGAH					
	1. SMA Negeri 3 Slawi	PGSD IKIP Semarang (Bekas SPGN Slawi)	Jl. Adipati, Slawi	Slawi	Kab. Tegal	09.1.2.1038.23.01.003.5110 09.1.2.1038.23.01.003.5120 09.1.2.1038.23.01.003.5130 09.1.2.1038.23.01.003.5210 09.1.2.1038.23.01.003.5220 09.1.2.1038.23.01.003.5230 09.1.2.1038.23.01.003.5250 09.1.2.1038.23.01.003.5350
2.	SMA Negeri 3 Cilacap	PGSD FKIP UMS (Bekas SPGN Cilacap)	Jl. Pahlawan Kemerdekaan No. 91 Cilacap	Cilacap Tengah	Kab. Cilacap	09.1.2.1038.23.01.003.5210 09.1.2.1038.23.01.003.5220 09.1.2.1038.23.01.003.5230 09.1.2.1038.23.01.003.5250 09.1.2.1038.23.01.003.5350
	3. SMA Negeri 5 Magelang	PGSD IKIP Semarang (Bekas SGON Magelang)	Jl. Gatot Subroto 54, Magelang	Magelang Selatan	Kodya Magelang	09.1.2.1038.23.01.003.5210 09.1.2.1038.23.01.003.5220 09.1.2.1038.23.01.003.5230 09.1.2.1038.23.01.003.5250 09.1.2.1038.23.01.003.5350

1	2	3	4	5	6	7
21.	IRIAN JAYA					
	1. SMA Negeri 5 Sorong	PGSD FKIP UNCEN (Bekas SPCN Sorong)	Jl. Pemuda No. 49 Sorong	Sorong	Kab. Sorong	09.1.2.1038.23.01.025.5110 09.1.2.1038.23.01.025.5120 09.1.2.1038.23.01.025.5150 09.1.2.1038.23.01.025.5210 09.1.2.1038.23.01.025.5220 09.1.2.1038.23.01.025.5230 09.1.2.1038.23.01.025.5250 09.1.2.1038.23.01.025.5350
22.	TIMOR TIMUR					
	1. SMA Negeri 3 Dili	PGSD FKIP UNDANA (Bekas SPCN Dili)	Jl. Timor Timur, Dili	Dili Tengah	Kab. Dili	09.1.2.1038.23.01.027.5110 09.1.2.1038.23.01.027.5120 09.1.2.1038.23.01.027.5150 09.1.2.1038.23.01.027.5210 09.1.2.1038.23.01.027.5220 09.1.2.1038.23.01.027.5230 09.1.2.1038.23.01.027.5250 09.1.2.1038.23.01.027.5350

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal,

ttd

BAMBANG TRIANTORO

